



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MUSTAFA, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Selanjutnya disebutkan pihak pertama DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nama : AMRIL MUKMININ, SE., MM

Jabatan : BUPATI BENGKALIS
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan pihak kedua

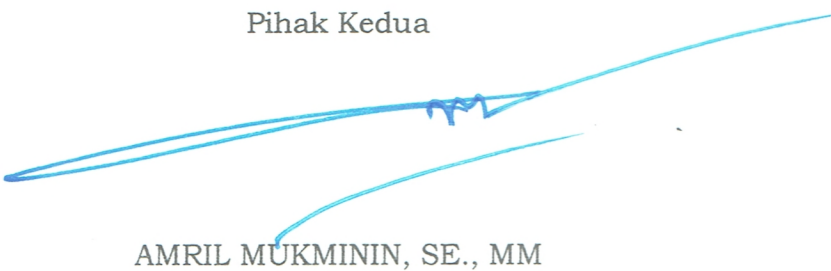
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

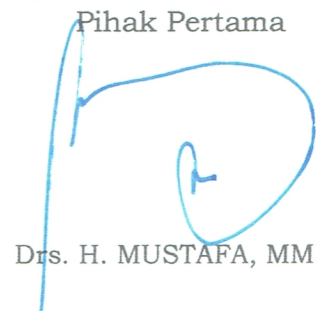
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Februari 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama


AMRIL MUKMININ, SE., MM


Drs. H. MUSTAFA, MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	90 . %
		Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	93 . %
		Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	25.0%
		Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43.23
		Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20
		Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	#REF!
		Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	88%
		Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	42%
		Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MT's) sesuai standar	35%
		Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	15%
		Persentase kelembagaan PUG yang aktif	0.07%
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	23.25%
		Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	8.80%
		Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	0.43
2.	Meningkatnya pemerataan dan jaminan pelayanan serta promosi kesehatan dan rujukan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	1%
		Prevalensi perempuan korban perdagangan orang	29%
		Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	2%
		Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	43%
		Perentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar	18%
		Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	21%
		Persentase anak korban kekerasan	84%
		Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	0.19%
Persentase pekerja anak	0%		

Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	1%
Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	1.00%
Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan	0%
Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	1%
Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	1%
Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	63.20
Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan	0.01
	31%

	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1,550,563,200
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	287,000,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	130,520,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	20,062,000
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	1,006,646,300
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	1,542,482,900
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	1,105,714,300

Pihak Kedua

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ, SE., MM

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,

Drs. H. MUSTAFA, MM

NIP. 19610219 198503 1 007